

**ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA,  
PENDAPATAN PERKAPITA DAN INVESTASI TERHADAP KEMISKINAN  
DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
TAHUN 2010-2018**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh:**

**RENNY ISMI HAPSARI**

**NPM: 1551010100**

**Jurusan: Ekonomi Syar'ah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441 H/2019 M**

**ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA,  
PENDAPATAN PERKAPITA DAN INVESTASI TERHADAP KEMISKINAN  
DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
TAHUN 2010-2018**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Pembimbing I: Vitria Susanti, M.A.,M.ec.Dev  
Pembimbing II: Femei Purnamasari, S.E.,M.Si**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2019 M**

## ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang paling sulit yang dihadapi oleh pemerintah. Kemiskinan di Provinsi Lampung menempati urutan ketiga tertinggi dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Sumatera, yaitu dengan rata-rata sebesar 13,14 persen dibawah Provinsi Aceh sebesar 15,36 persen diurutan pertama dan diurutan kedua Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar 15,14 persen. Angka investasi yang berfluktuatif serta indeks pembangunan manusia dan pendapatan perkapita yang meningkat setiap tahunnya seharusnya mampu mengurangi kemiskinan di Provinsi Lampung. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita dan investasi secara parsial di Provinsi Lampung? dan bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita dan investasi secara simultan di Provinsi Lampung? dan Bagaimana pengaruh kemiskinan di Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi islam?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita dan investasi secara parsial dan simultan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung serta mengetahui bagaimana pengaruh kemiskinan di Provinsi Lampung dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang didapat dari BPS Nasional. Jenis data yang digunakan adalah data *time series* yaitu tahun 2010-2018. Untuk proses analisis data menggunakan data analisis regresi linier berganda dengan variabel indeks pembangunan manusia (X1), pendapatan perkapita (X2), investasi (X3) dan kemiskinan (Y). Hasil dari penelitian ini adalah variabel indeks pembangunan manusia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, karena dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah akan menyebabkan pendidikan dan kesehatan yang menurun sehingga berimbas pada kemiskinan yang meningkat. Kemudian pendapatan perkapita berpengaruh terhadap kemiskinan. Selanjutnya investasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Jika masyarakat memiliki pendapatan tinggi maka kebutuhan hidup akan terpenuhi dan masyarakat dapat berinvestasi yang akan memberi dampak positif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja sehingga kemiskinan menurun. Dalam pandangan Ekonomi Islam bahwa kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar sehingga akan menghambat pembangunan ekonomi, maka Islam menganjurkan manusia untuk berinvestasi, berdagang dan berbisnis. Islam juga memudahkan segala sumber rejeki baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia, karena pada hakikatnya rejeki itu datangnya dari Allah SWT bukan dari manusia.

**Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Perkapita, Investasi dan Kemiskinan**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN  
MANUSIA, PENDAPATAN PERKAPITA, DAN  
INVESTASI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI  
LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
TAHUN 2010-2018**

Nama Mahasiswa : **Renny Ismi Hapsari**  
NPM : **1551010100**  
Program Studi : **Ekonomi Syari'ah**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Vitria Susanti, M. A., M. Ec.Dev**

**NIP. 19780918200512005**

**Pembimbing II**

**Femei Purnamasari, S. E., M. Si**

**NIP. 198405212015032004**

**Ketua Jurusan**

**Madnasir, S.E., M.Si**

**NIP.197504242002121001**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PENDAPATAN PERKAPITA, DAN INVESTASI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2010-2018** disusun oleh **Renny Ismi Hapsari, NPM: 1551010100**, Jurusan **Ekonomi Syari'ah**, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu, 12 Februari 2020**.

**TIM MUNAQASAH**

Ketua Sidang : Dr. H. Ruhban Masykur, M.Pd

Penguji 1 : Hanif, S.E. M.M

Penguji 2 : Femei Purnamasari S.E., M.Si

Sekretaris : Uul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I



**Dr. Ruslan Abdul Wahid, S.Ag., M.Si**

**NIP. 196008012003121001**

## MOTTO

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ ٢٦

*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros*

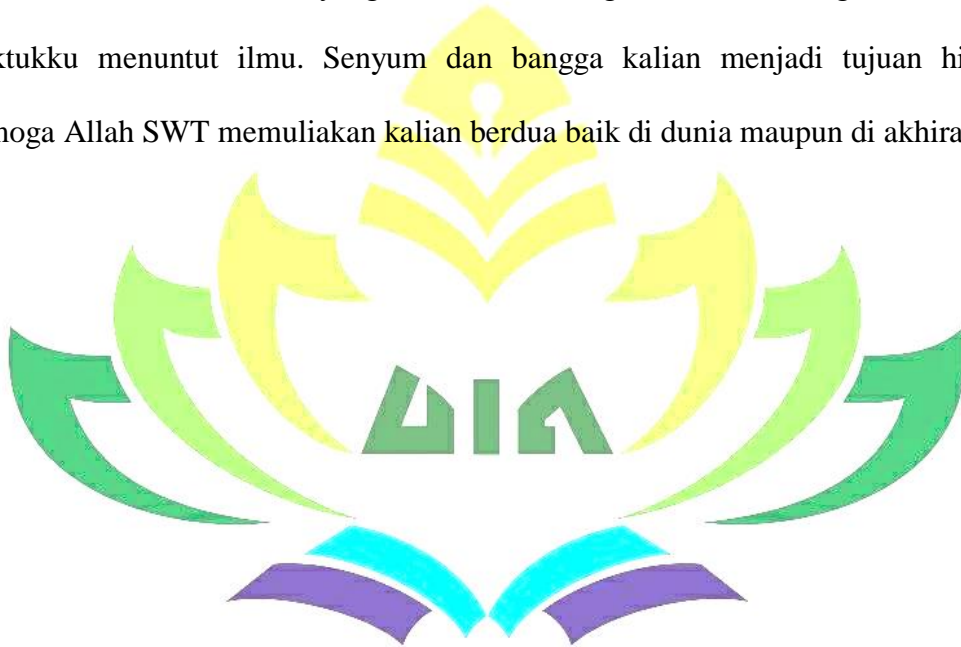
(Q.S Al-Isra': 26)





## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Wagirin dan Ibu Supartini, terimakasih atas cinta dan kasih sayang, pengorbanana, dukungan, motivasi seta do'a kalian yang selalu membangkitkan dan menguatkan disetiap waktukku menuntut ilmu. Senyum dan bangga kalian menjadi tujuan hidupku. Semoga Allah SWT memuliakan kalian berdua baik di dunia maupun di akhirat.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Renny Ismi Hapsari dilahirkan di Sukanegara, pada tanggal 28 November 1997 yang merupakan anak kedua dari tiga saudara dari pasangan Bapak Wagirin dan Ibu Supartini.

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Dwi Warna Panjang yang diselesaikan pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Swasta Dwi Warna Panjang, yang telah diselesaikan pada tahun 2009. Setelah itu, melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012. Kemudian lanjut ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015. Dan pada tahun 2015 meneruskan pendidikan S1 Prodi Ekonomi Syari'ah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung melalui jalur SPAN-PTKIN pada tahun 2015.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT penulis haturkan, karena dengan karunia dan anugrah-Nya skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Perkapita dan Investasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung Dalam Persepektif Ekonomi Islam Tahun 2010-2018”** dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada zaman yang penuh dengan cahaya Islam.

Penulis menyadari bahwa penulis tidak akan sanggup menyelesaikan skripsi ini tanpa ada dorongan, bantuan dan kerja sama dari pihak-pihak yang berperan dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada pihak yang terhormat:

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Madnasir S.E., M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan nasihat.
3. Vitria Susanti, M.A.,M.ec.Dev selaku pembimbing I dan Femei Purnamasari, S.E.,M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan nasihat dan arahan kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang mendidik dan memberi ilmu pengetahuan.

5. Pimpinan dan karyawan perpustakaan pada faultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Sahabatku Ulung, Endah, Sholehah, Yunizar, Dzaky, Fadly, dan Fitra, Mala, Anmeysa. Terimakasih selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi, dan doa selama masa perkuliahan ini.
7. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas B Jurusan Ekonomi Syari'ah angkatan 2015 yang selalu bersama selama perkuliahan serta memberikan semangat.
8. Teman-teman KKN 38 Desa Baru Ranji yang telah memberikan motivasi, arahan dan doa dalam peyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

Bandar Lampung, 2019

**Penulis**

**Renny Ismi Hapsari**  
**1551010100**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

ABSTRAK .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Batasan Masalah.....	16
E. Rumusan Masalah .....	16
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Kemiskinan.....	19
1. Definisi Kemiskinan.....	19
2. Penyebab Kemiskinan .....	23
3. Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	26
B. Indeks Pembangunan Manusia.....	28
1. Definisi Indeks Pembangunan Manusia .....	28



2. Komponen Indeks Pembangunan Manusia .....	31
C. Pendapatan PerKapita .....	
1. Definisi Pendapatan PerKapita.....	34
2. Manfaat Pendapata Perkapita .....	36
D. Investasi.....	37
1. Definisi Investasi.....	37
2. Jenis-jenis Investasi.....	38
3. Tujuan dan Manfaat Investasi .....	40
E. Tinjauan Pustaka .....	42
F. Kerangka Berpikir.....	47
G. Hipotesis.....	48

### **BAB III METEDOLOGI**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	53
B. Populasi dan Sampel Penelitian .....	54
C. Definisi dan Variabel Penelitian .....	55
D. Sumber Data.....	57
E. Metode Pengumpulan Data.....	58
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	58

### **BAB IV HA SIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

A. Hasil Penelitian .....	65
1. Sejarah Singkat Provinsi Lampung .....	65
2. Gambaran Umum Provinsi Lampung .....	65
3. Gambaran Hasil Penelitian.....	68
4. Analisis Data .....	74
a. Uji Asumsi Klasik.....	74
b. Analisis Regresi Linier Berganda .....	78
c. Uji Hipotesis .....	81

B. Pembahasan.....	86
1. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan PerKapita, Investasi Terhadap Kemiskinan Secara Parsial di Provinsi Lampung Tahun 2010-2018.....	86
a. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung.....	86
b. Analisis Pengaruh Pendapatan PerKapita Terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung.....	88
c. Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung .....	90
2. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan PerKapita, Investasi Terhadap Kemiskinan Secara Simultan di Provinsi Lampung Tahun 2010-2018 .....	93
3. Analisis Pengaruh Kemiskinan di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	94
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sumatera Pada Tahun 2010 – 2018.....	7
Tabel 1.2	Persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi di Sumatera pada tahun 2010-2018 .....	10
Tabel 1.3	Pendapatan Perkapita Provinsi Lampung Tahun 2010-2018.....	12
Tabel 1.4	Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Provinsi Lampung Tahun 2010-2018.....	15
Tabel 4.1	Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Lampung Tahun 2010-2018 .....	69
Tabel 4.2	Perentase Indeks Pembangunan Manusiai (IPM) Provinsi Lampung Tahun 2010-2018.....	71
Tabel 4.3	Pendapatan Perkapita Provinsi Lampung Tahun 2010-2018.....	72
Tabel 4.4	Realisasi Investasi PMDN dan PMA di provinsi Lampung Tahun 2010-2018 .....	73
Tabel 4.5	Hasil Uji Normalitas .....	74
Tabel 4.6	Hasil Uji Multikolinieritas .....	75
Tabel 4.7	Hasil Uji Autokolerasi.....	76
Tabel 4.8	Hasil Regresi Linier Berganda .....	79
Tabel 4.9	Hasil Uji Simultan (F) .....	82
Tabel 4.10	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	84



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Teori Lingkaran Kemiskinan .....	24
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran.....	48
Gambar 4.1	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	78



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, karena judul ini akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun Skripsi ini berjudul **“ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PENDAPATAN PERKAPITA DAN INVESTASI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2010-2018”**.

Mempertegas istilah-istilah judul diatas secara rinci agar dapat dimengerti dan untuk menghindari salah pengertian dalam memahami maksud judul skripsi ini, terlebih dahulu akan penulis uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Berikut ini dapat dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. **Analisis** adalah kegiatan untuk memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, mengetahui isu yang sedang terjadi, dan memutuskan apa yang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah.<sup>1</sup>
2. **Pengaruh** adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (benda, orang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 842

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1045

3. **Indeks Pembangunan Manusia** adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup, melalui pendekatan tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang layak.<sup>3</sup>
4. **Pendapatan PerKapita** adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara yang diperoleh dari perhitungan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama.<sup>4</sup>
5. **Investasi** adalah komitmen atas sumber daya lainnya saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa datang.<sup>5</sup>
6. **Kemiskinan** adalah menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan atau suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia.<sup>6</sup>
7. **Ekonomi Islam** adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran agama Islam.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan dan penegasan bagian-bagian diatas, maka yang menjadi pembahasan dalam judul skripsi ini “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan PerKapita dan Investasi Terhadap

---

<sup>3</sup> Rabania Yunus, Mansyur Radjab, Analisis Pengentasan Kemiskinan, Studi Kasus pada Program Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, (Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018), h.50

<sup>4</sup> Wirastuti Widyatmanti, Dini Natalia, Geografi, (Jakarta: PT.Grasindo, 2008), h.3

<sup>5</sup> Erduardus Tandelilin, Portofolio dan Investasi, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h.2

<sup>6</sup> Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h.9

<sup>7</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 8



Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Lampung Tahun 2010-2018” adalah menganalisis bagaimana pengaruh variabel-variabel makro ekonomi pada IPM, Pendapatan PerKapita, dan Investasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam dari tahun 2010-2018.

#### **A. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih dan menetapkan judul tersebut untuk di teliti secara objektif adalah

##### **1. Secara Objektif**

Kemiskinan merupakan indikator sosial dalam pembangunan ekonomi dan indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat. Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung menunjukkan proses pembangunan ekonomi yang belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat walaupun terdapat penurunan kemiskinan, seperti pada data BPS Provinsi Lampung pada tahun 2018 persentase angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 13,08 persen, namun angka tersebut masih berada di peringkat 3 tertinggi dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera.<sup>8</sup> Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan, namun masalah tersebut belum juga terurai karena setiap upaya yang dilakukan tersebut implementasinya kurang bisa dirasakan oleh masyarakat Lampung.

Upaya mengetaskan kemiskinan dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sehingga angka indeks pembangunan manusia lebih

---

<sup>8</sup> BPS, “Provinsi Lampung Dalam Angka 2017”. Desember 2018, h. 120

meningkat dan pada akhirnya pengaruh terhadap kemiskinan. Kondisi IPM di Provinsi Lampung mengalami kenaikan disetiap tahun nya tetapi rata-rata IPM di Provinsi Lampung menduduki urutan terendah diantara provinsi lain di Pulau Sumatera.<sup>9</sup>

Selanjutnya dalam hal upaya mengentaskan kemiskinan, pemerintah harus mendistribusikan pendapatan secara adil dan merata sehingga seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin dan dalam investasi pemerintah mengambil kebijakan moneter yaitu kebijakan ekspansif yang artinya penurunan suku bunga sehingga akan meningkatkan investasi yang dapat memacu perluasan kerja dan berdampak pada penurunan kemiskinan.

## **2. Secara Subjektif**

Dari aspek yang akan dibahas tersebut memungkinkan diadakan penelitian dan penulis ingin mengkaji lebih dalam pada penelitian ini, karena tersedianya data-data atau informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini, baik informasi langsung dari Institusi terkait maupun dari perpustakaan serta media lainnya yang mudah didapatkan. Selain itu yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis geluti saat ini yakni berkenaan dengan Konsentrasi Ekonomi Pembangunan di Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung.

---

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2016

## B. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi pada dasarnya tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi ditekankan juga pada peningkatan pemerataan pendapatan, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan menciptakan kesejahteraan. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan jumlah penduduk miskin, karena kemiskinan menimbulkan dampak negatif yang dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Kemiskinan juga merupakan salah satu indikator sosial yang paling penting dalam pembangunan ekonomi.<sup>10</sup>

Mengingat kemiskinan sebagai masalah yang bersifat multidimensi karena menyangkut semua aspek kehidupan manusia mulai dari sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus ke arah tindakan kekerasan dan kejahatan.<sup>11</sup> Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Secara umum Kemiskinan merupakan sesuatu yang kompleks dalam

---

<sup>10</sup> Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi: Di Dunia Ketiga* Edisi 9, Jakarta Penerbit Erlangga. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar, h.6

<sup>11</sup> Hastina Febriaty, Nurwani, *Pengaruh Pendapatan Perkapita, Investasi dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol 3 No. 2 2017, h.157



arti, kemiskinan bukan hanya disebabkan karena masalah kekurangan pendapatan dan harta, tetapi berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek diluar pendapatan seperti akses layanan publik dan infrastruktur dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.<sup>12</sup>

Perhatian Islam terhadap masalah kemiskinan sangat besar sekali. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan masalah kemiskinan, salah satu diantaranya dalam surat al-Dariyat ayat 19 yang berbunyi :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Artinya: *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”*.

Islam menyatakan perang dengan kemiskinan, dari berusaha keras membendunginya, serta mengawasi berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan, guna menyelamatkan aqidah, akhlak dan perbuatan memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan serta ketentraman antara sesama anggota masyarakat.<sup>13</sup>

Permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Lampung adalah masalah masih tingginya angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Lampung bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera masih tergolong cukup tinggi. Kemiskinan dirasa masih menjadi permasalahan yang cukup serius, hal ini

---

<sup>12</sup> Naylal Fithri, David Kaluge. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 15, No. 2, Desember 2017.

<sup>13</sup> Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.73

ditandai dengan banyaknya masyarakat yang masih sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup dan masih banyak masyarakat menjadi pengangguran.

**Tabel 1.1**  
**Persentase Penduduk Miskin**  
**Menurut Provinsi di Sumatera Tahun 2010 - 2018 (dalam persen)**

No.	Provinsi	Tahun									Rata-Rata
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Aceh	10.49	9.8	19.02	16.16	17.52	17,11	16,43	15,92	15.83	15,36
2	Sumatera Utara	5.66	5.67	10.54	10.23	9.62	10,79	10,27	9,28	9.08	9.02
3	Sumatera Barat	4.75	4.52	8.1	7.85	7.15	6,71	7,14	6,75	6.6	6.62
4	Riau	4.33	4.24	8.14	8.07	8.05	8,82	7,67	7,90	7.3	7.17
5	Jambi	4.17	4.33	8.35	8.25	8.17	9,12	8,37	8,10	7.87	7.41
6	Sumatera Selatan	7.74	7.12	13.63	14.15	13.98	13,77	13,39	13,10	12.81	12.19
7	Bengkulu	9.15	8.6	17.61	18.05	17.63	17,16	17,03	15,59	15.42	15.14
8	<b>Lampung</b>	<b>9.47</b>	<b>8.47</b>	<b>15.92</b>	<b>14.63</b>	<b>14.34</b>	<b>14,35</b>	<b>14,29</b>	<b>13,69</b>	<b>13.08</b>	<b>13.14</b>
9	Kep. Bangka Belitung	3.23	2.88	5.45	5.23	5.31	4,83	5,04	5,30	5.01	4.70
10	Kep. Riau	4.03	3.7	6.97	6.41	6.55	5,78	5,84	6,13	6.02	5.71

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2017*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera dari tahun 2010 hingga tahun 2018. Rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung menempati urutan ketiga yaitu sebesar 13.14 persen. Sedangkan rata-rata persentase tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera diurutan pertama adalah Provinsi Aceh yaitu sebesar 15.36 persen. Dan rata-rata persentase kemiskinan di Pulau Sumatera diurutan kedua adalah Provinsi Kep. Bangka Belitung yaitu sebesar 15.14 persen.

Provinsi Lampung memiliki potensi-potensi sumber daya alam yang melimpah seperti potensi perikanan laut karena Provinsi Lampung berbatasan langsung dengan Selat Sunda di bagian selatan serta Laut Jawa di bagian timur dan Samudra Indonesia di bagian barat hal ini yang menyebabkan potensi

perikanan laut yang melimpah, selanjutnya potensi perkebunan dan pertanian yang cukup besar dan melimpah seperti padi (peringkat 7 nasional), jagung (penghasil 3 nasional), ubi kayu dan tebu (peringkat 1 dan 2 nasional) hal ini karena Provinsi Lampung merupakan daerah peninggalan penduduk transmigrasi.<sup>14</sup> Dan Provinsi Lampung juga mempunyai potensi infrastruktur yang baik dan strategis seperti adanya infrastruktur Pelabuhan Panjang, Dermaga Eksekutis Bakauheni, Bandara Internasional Raden Intan II hingga jalan tol yang menghubungkan lintas Pulau Sumatera.<sup>15</sup> Dengan di bangunnya jalan tol akan memberikan dampak positif yang akan membuat distribusi barang dan jasa semakin cepat dan lancar serta dapat meningkatkan perekonomian. Seharusnya dengan adanya potensi-potensi yang besar pendapatan provinsi Lampung semakin besar sehingga tingkat kemiskinan menjadi rendah, tetapi faktanya kemiskinan di Provinsi Lampung menempati urutan ketiga termiskin jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Sumatera.

Kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, terutama bagi pemerintah daerah untuk segera mencari solusi bagaimana cara menanggulangi angka kemiskinan yang cukup tinggi tersebut dan pemanfaatan potensi-potensi secara maksimal.<sup>16</sup> Berbagai program kemiskinan dan kebijakan pemerintah telah dilaksanakan akan tetapi

---

<sup>14</sup> BPS, Lampung Dalam Angka 2017, h.43

<sup>15</sup> [http:// www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

<sup>16</sup> Deris Desmawan, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung*, Tesis, Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Lampung, 2016, h. 5

angka kemiskinan masih juga tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain. Manusia memiliki peran penting dalam membangun suatu negara menjadi yang lebih baik, pembangunan manusia sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga dapat memicu kemajuan pada pembangunan negara, dengan melalui alokasi dana yang digunakan untuk peningkatan bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain.<sup>17</sup>

Salah satu cara untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia yaitu dengan Indeks Pembangunan Manusia. Pada tahun 1990 *United Nation Development Program (UNDP)* memperkenalkan “*Human Development Index (HDI)*” atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dapat menggambarkan hasil pelaksanaan pembangunan manusia menurut tiga komponen indikator kemampuan yang sangat mendasar yaitu: kesehatan, kualitas pendidikan, serta akses terhadap sumber daya ekonomi berupa pemerataan tingkat daya beli masyarakat.<sup>18</sup> Indikator kesehatan diukur dengan usia panjang atau tingkat harapan hidup, indikator pendidikan diukur dengan angka harapan lama sekolah huruf dan rata-rata lama sekolah, sementara itu standar kehidupan diukur dengan pendapatan riil yang disesuaikan, yaitu kemampuan daya beli.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.278

<sup>18</sup> Mudrajat Kuncoro, *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*, Cetakan kedua (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h.221

<sup>19</sup> Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*, (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2015), h.6



Didalam teori pertumbuhan baru dijelaskan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) atau dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan meningkatkan keterampilan, penguasaan teknologi dan produktivitas penduduk, yang akan meningkatkan nilai jual dan kemampuan penduduk untuk memperoleh pekerjaan di dunia usaha atau membuka usaha sendiri, sehingga pengangguran akan berkurang dan tingkat pendapatan akan bertambah, hal tersebut akan menurunkan tingkat kemiskinan. Tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat pendapatan yang tinggi akan tercermin pada IPM yang tinggi. Oleh karena itu peningkatan kualitas manusia harus terus dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.<sup>20</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional, masalah yang dihadapi Provinsi Lampung adalah rendahnya IPM. Data menunjukkan dari tahun 2010-2018 Provinsi Lampung menempati urutan terendah di Pulau Sumatera. Berikut persentase Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2010-2018 di lihat dari tabel 1.2 berikut dibawah ini:

---

<sup>20</sup> Sylvia Yasmin Supraba, Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2015, h.21

**Tabel 1.2**  
**Persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Menurut Provinsi Di Sumatera Tahun 2010-2018**

No.	Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata
1	Aceh	67.09	67.45	67.81	68.3	68.81	69.45	70	70.6	71.2	68.97
2	Sumatera Utara	67.09	67.34	67.74	68.36	68.87	69.51	70	70.6	71.2	68.96
3	Sumatera Barat	67.25	67.81	68.36	68.91	69.36	69.98	70.7	71.2	71.7	69.48
4	Riau	68.65	68.9	69.15	69.91	70.33	70.84	71.2	71.8	72.4	70.35
5	Jambi	65.39	66.14	66.94	67.76	68.24	68.89	69.6	70	70.7	68.18
6	Sumatera Selatan	64.44	65.12	65.79	66.16	66.75	67.46	68.2	68.9	69.4	66.91
7	Bengkulu	65.35	65.96	66.61	67.5	68.06	68.59	69.3	70	70.6	67.99
8	<b>Lampung</b>	<b>63.71</b>	<b>64.2</b>	<b>64.87</b>	<b>65.73</b>	<b>66.42</b>	<b>66.95</b>	<b>67.7</b>	<b>68.3</b>	<b>69</b>	<b>66.32</b>
9	Bangka Belitung	66.02	66.59	67.21	67.92	68.27	69.05	69.6	70	70.7	68.36
10	Kep. Riau	71.13	71.61	72.36	73.02	73.4	73.75	74	74.5	74.8	73.17

Sumber: *Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2018*

Tabel 1.2 menunjukkan persentase indeks pembangunan manusia di Pulau Sumatera tahun 2010-2018. IPM di Pulau Sumatera yang menempati urutan pertama adalah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 73.17, dan IPM terendah adalah Provinsi Lampung sebesar 66.32, walaupun IPM mengalami peningkatan di setiap tahunnya, akan tetapi kenyataannya tingkat kemiskinan masih tinggi. Indeks pembangunan manusia Provinsi Lampung memiliki nilai IPM 66,0 sampai 79,9. yang artinya IPM Provinsi Lampung tergolong dalam kelompok wilayah dengan tingkat pembangunan manusia menengah atas (*medium human development*).

Salah satu masalah yang dihadapi adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan terjadi apabila sebagian besar penduduk memperoleh pendapatan yang rendah, sementara pendapatan yang besar hanya dinikmati oleh sebagian kecil penduduk. Semakin besar perbedaan pendapatan

yang diterima masing-masing individu menunjukkan semakin besarnya ketimpangan pendapatan antar rumah tangga. Pendapatan regional per kapita atau PDRB per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk disuatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut.

Menurut Sadono Sukirno, laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apabila kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur dengan PDRB tetapi harus memperhatikan distribusi pendapatan. Hal ini berarti semakin tinggi pendapatan perkapita maka semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain penduduk miskin akan berkurang.<sup>21</sup>

Provinsi Lampung sebagai salah satu propinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan distribusi pendapatan. Berikut persentase Pendapatan Perkapita Provinsi Lampung tahun 2010-2018 dilihat dari tabel 1.3 sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Pendapatan Perkapita Provinsi Lampung**  
**Tahun 2010-2018 (dalam rupiah)**

Tahun	Pendapatan Perkapita
2010	19.722.390
2011	21.981.470
2012	23.910.840
2013	25.768.940
2014	28.755.170
2015	31.153.720

---

<sup>21</sup>Sukirno Sadono, Pengantar Teori Makro Ekonomi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.37

2016	34.053.970
2017	36.998.240
2018	39.864.050

*Sumber: BPS Nasional tahun 2018*

Tabel 1.3 menunjukkan pendapatan perkapita di Provinsi Lampung pada tahun 2010 sampai 2018 mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 sebesar 19.722.390 juta, dan selama kurun waktu 2011-2018 pendapatan perkapita bahwa setiapnya tahunnya pendapatan perkapita penduduk Lampung selalu lebih tinggi dari tahun ke tahun.<sup>22</sup> Tetapi angka pendapatan perkapita di Provinsi Lampung tersebut masih lebih rendah dari pendapatan perkapita nasional yaitu sebesar 56 juta/tahun.

Kondisi ketimpangan dan kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang harus kita hadapai mengingat masalah kesenjangan dapat menyulitkan kita dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan pemerataan. Oleh karena itu ketimpangan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya bisa dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut tetap terpelihara dalam proses pertumbuhannya.<sup>23</sup>

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Hal ini dikarenakan dalam proses produksi barang dan jasa meningkat yang pada

<sup>22</sup> BPS Provinsi Lampung, Laporan Perekonomian Provinsi Lampung, 2015, h.22

<sup>23</sup> Eko Hariyadi, Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah, h.7



gilirannya akan menyerap angkatan kerja. Sehingga tenaga kerja tersebut memperoleh upah dan tenaga kerja tersebut mempunyai daya beli. Dengan semakin banyak investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang jasa, dimana tenaga kerja dapat diserap lebih banyak, sehingga terjadi pemerataan pendapatan perkapita dan dapat mengurangi kemiskinan.<sup>24</sup>

Mengurangi kemiskinan perlu adanya investasi sebagai sumber pembangunan ekonomi, modernisasi, pertumbuhan pendapatan ketenagakerjaan, pengurangan kemiskinan perlu mendapatkan perhatiannya serius. Investasi memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, penting untuk menentukan strategi investasi yang akan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.<sup>25</sup>

Menurut Noor Investasi dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat yaitu baik individu, kelompok, bahkan negara. Dalam Teori Harrod Domar menjelaskan investasi sebagai penggerak pembangunan ekonomi, karena investasi dapat menciptakan tambahan pendapatan dan investasi dapat pula memperbesar kapasitas produksi melalui meningkatnya perseediaan modal, yang disebut efek penawaran. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Dengan demikian investasi diperlukan untuk memenuhi

---

<sup>24</sup> Sukirno Sadono, *Pengantar Teori*....,h.135

<sup>25</sup> Adnan, P. Eko Prasetyo, Investment On The Community Income And The Economic Growth In Central Java. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura* Volume 13. Universitas Negeri Malang, 2010, h.65

kebutuhan masyarakat, berupa sumber nafkah atau pendapatan. Peningkatan investasi dapat mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, maka akan mengurangi jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan<sup>26</sup>

Setiap Provinsi yang ada di Indonesia, termasuk juga Provinsi Lampung harus mampu mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi. Dimana setiap daerah memiliki perbedaan untuk menggali dan mengelola kekayaan daerah yang dimilikinya dan memanfaatkannya. Berikut data investasi PMA dan PMDN di Provinsi Lampung tahun 2010-2018 dilihat dari tabel 1.4 sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Realisasi Investasi PMDN dan PMA**  
**di Provinsi Lampung Tahun 2010-2018**

Tahun	Invstasi PMDN (miliar rupiah)	Investasi PMA (juta US\$)
2010	272.300.000.000	30.700.000
2011	824.400.000.000	79.500.000
2012	304.200.000.000	114.300.000
2013	1.325.300.000.000	46.800.000
2014	3.495.700.000.000	156.500.000
2015	1.102.300.000.000	257.700.000
2016	6.031.800.000.000	85.700.000
2017	7.014.800.000.000	120.600.000
2018	12.314.710.000.000	132.290.000

*Sumber: BPS Nasional Tahun 2017*

Pada Tabel 1.4 diatas mengenai perkembangan realisasi Investasi PMDN dan PMA Provinsi Lampung, bahwa peningkatan dan penurunan dalam hal investasi

---

<sup>26</sup> Noor, H.f, Ekonomi Publik: Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat, (Jakarta:PT Indeks, 2015),h.142

yang terjadi masih fluktuatif. PMDN tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 12.314.710.000.000 rupiah dan investasi terendah pada tahun 2010 sebesar 272.300.000.000 rupiah, pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1.102.300.000.000 rupiah dari tahun sebelumnya. Dan investasi PMA pada tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 46.800.000 US\$ dan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 156.500.000 US\$, tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali sebesar 85.700.000 US\$.<sup>27</sup>

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa, tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung masih menjadi masalah yang harus diatasi, dimana diperlukan adanya analisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung tersebut adalah IPM, Pendapatan Perkapita dan Investasi. Oleh karena itu, maka penting untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan PerKapita dan Investasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung, dengan itu penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan PerKapita dan Investasi Terhadap Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Lampung Tahun 2010-2018”**.

---

<sup>27</sup> BPS Provinsi Lampung, Indikator Makro Ekonomi Regional, 2016. h.35

### **C. Batasan Masalah**

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan IPM, Pendapatan Perkapita, dan Investasi sebagai variabel X (Independen).
2. Kemiskinan dalam penelitian ini adalah sebagai variabel Y (dependen), pengolahan sumber datanya menggunakan data dan informasi kemiskinan BPS Lampung tahun 2010-2018.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Kemiskinan secara parsial di Provinsi Lampung tahun 2010-2018?
2. Bagaimana Pendapatan Perkapita berpengaruh terhadap Kemiskinan secara parsial di Provinsi Lampung tahun 2010-2018?
3. Bagaimana Investasi berpengaruh terhadap Kemiskinan secara parsial di Provinsi Lampung tahun 2010-2018?
4. Bagaimana Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Perkapita, dan Investasi berpengaruh terhadap Kemiskinan secara simultan di Provinsi Lampung tahun 2010-2018?



5. Bagaimana pengaruh Kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2010-2018 dalam perspektif Ekonomi Islam?

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan secara parsial di Provinsi Lampung tahun 2010-2018.
- b. Untuk mengetahui Pendapatan Perkapita terhadap Kemiskinan secara parsial di Provinsi Lampung tahun 2010-2018.
- c. Untuk mengetahui Investasi terhadap Kemiskinan secara parsial di Provinsi Lampung tahun 2010-2018.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Perkapita, Investasi terhadap Kemiskinan secara simultan di Provinsi Lampung tahun 2010-2018.
- e. Untuk mengetahui pengaruh Kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2010-2018 dalam perspektif Ekonomi Islam.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang membutuhkannya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Bagi pengembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran dan pengembangan sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan yakni pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah di provinsi Lampung sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam mendorong perekonomian, pembangunan daerah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa atau lapisan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu Ekonomi Islam di setiap perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan menjadi kontribusi pemikiran ilmiah bagi hukum positif di Indonesia dan normatif di Indonesia yang berkaitan dengan Ekonomi Islam.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kemiskinan

##### 1. Definisi Kemiskinan

Menurut Mubyanto bahwa kemiskinan digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok atau kebutuhan hidup yaitu sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan.<sup>28</sup>

Kemiskinan menurut Suharto kemiskinan merupakan masalah yang tidak kunjung usai. Di negara maju, kemiskinan lebih bersifat individual, yaitu disebabkan karena seseorang mengalami kecacatan (fisik atau mental), ketuaan, sakit yang parah. Namun, pada negara berkembang kemiskinan lebih disebabkan pada sistem ekonomi dan politik bangsa yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Menurut World Bank, dalam mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Hal ini termasuk penghasilan rendah dan ketidakmampuannya untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang di perlukan untuk bertahan hidup dengan

---

<sup>28</sup> Mubyanto, Kemiskinan, Pengangguran, dan Ekonom, Vol. III, No 2: Jurnal Dinamika Masyarakat, 2004, h.160.

<sup>29</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagaas Model Jaminan Sosial Universitas Bidang Kesehatan*. (Bandunng: CV Alfabeta, 2009), h.17

martabat. Kemiskinan juga meliputi rendahnya tingkat kesehatan, dan pendidikan, akses terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai serta kesempatan hidup yang lebih baik.<sup>30</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan tiga indikator kemiskinan, yaitu: (1) *Head Count Index* (HCI-P0), yaitu presentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan. (2) *Poverty Gap Index-P1* yaitu index kedalaman kemiskinan yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai index, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dan garis kemiskinan. (3) *Poverty Severity Index-P2* yaitu index keparahan kemiskinan yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Foster memperkenalkan tiga indikator untuk mengukur kemiskinan yaitu:

- a. *The incidence of poverty* yaitu persentase dari populasi yang hidup didalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita dibawah garis kemiskinan. Indeksnya sering disebut rasio H.
- b. *The dept of poverty* adalah sesuatu yang menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan Indeks Jarak

---

<sup>30</sup>Wiguna, Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provins Jawa Tengah pada tahun 2005-2010. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, h. 30

<sup>31</sup> Badan Pusat Statistika Indonesia, “Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia tahun 2010-2015” , Badan Pusat Statistika Indonesia, Jakarta, 2016.



Kemiskinan (IJK). Indeks ini mengukur jarak atau perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan.

- c. *The severity of poverty* yang diukur dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK). Indeks ini mengukur ketimpangan diantara penduduk miskin.<sup>32</sup>

Pada dasarnya ada macam-macam kemiskinan yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan struktural.

a. Kemiskinan Absolut

Yaitu kemiskinan yang diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar nya yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan serta kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang menunjang kehidupannya. Pada dasarnya konsep kemiskinan ini dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan inilah yang digolongkan sebagai penduduk miskin.

b. Kemiskinan Relatif

Yaitu kemiskinan yang dilihat dari aspek ketimpangan sosial, seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah

---

<sup>32</sup> Tulus T.H. Tambunan, *perekonomia Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 95

dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitarnya. Semakin besar ketimpangan antara tingkat kehidupan golongan atas dan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif berkaitan dengan masalah distribusi pendapatan. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis.<sup>33</sup>

c. Kemiskinan Struktural

Yaitu situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan.<sup>34</sup> Kemiskinan struktural dengan kata lain kemiskinan yang disebabkan dari struktur atau tatanan yang tidak menguntungkan. Didalam kondisi struktur tersebut kemiskinan bukan disebabkan oleh hal-hal yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tak adil. Tatanan yang tak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil yang menjadi serba kekurangan.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h.84

<sup>34</sup> Wisnu Prasetyo, *Determinan Kemiskinan di Pulau Sumatera*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung 2018, h.13

## 2. Penyebab Kemiskinan

Menurut Kuncoro, mengemukakan bahwa terdapat tiga penyebab utama kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi sebagai berikut:

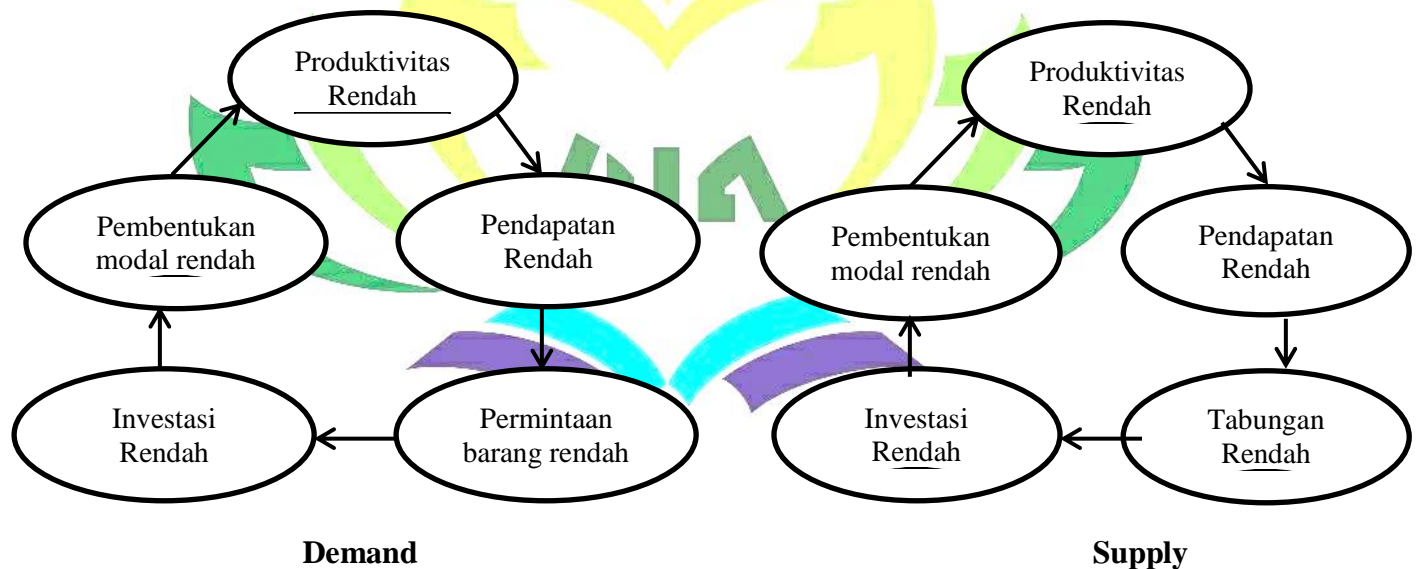
- a. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memilih sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas rendah, dan berakibat upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, adanya diskriminasi ataupun keturunan.
- c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses terhadap modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Kuncoro Mudrajat, *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan Edisi Keempat*. (Yogyakarta :UPP AMP YKPN,2016), h.120

Teori Nurkse tentang lingkaran kemiskinan yang berpendapat bahwa kemiskinan bukanlah disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu, tetapi juga akan menghadirkan hambatan kepada pembangunan di masa mendatang. Sehubungan dengan itu Nurkse mengatakan “Suatu negara jadi miskin karena ia merupakan negara miskin. Adapun dua jenis lingkaran kemiskinan yang dimaksud Nurkse adalah lingkaran dari segi penawaran modal dan dari segi permintaan modal seperti pada gambar 2.1

**Gambar 2.1**  
**Teori Lingkaran Kemiskinan**



Menurut Nurkse ada dua lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu dari segi penawaran (*supply*) dimana tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah, sehingga menyebabkan

tingkat pembentukan modal yang rendah, tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah menyebabkan kekurangan modal, dan dengan demikian tingkat produktivitasnya juga rendah dan seterusnya. Dari segi permintaan (*demand*), di negara-negara berkembang mengalami hambatan untuk menanamkan modal sangat rendah, karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, hal ini disebabkan oleh karena pendapatan masyarakat sangat rendah. Pendapatan masyarakat sangat rendah karena tingkat produktivitas yang rendah.<sup>36</sup>

Menurut World Bank salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset, dengan kurangnya pendapatan maka seseorang tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Selain itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin, tidak memiliki pekerjaan, serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid, h. 125

<sup>37</sup> Harlik, Amri Amir, Hardiani, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 1 No. 2, Oktober 2013, h.111



### 3. Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, keluarga dan juga masyarakat.<sup>38</sup> Kemiskinan akan menyebabkan kerukunan antar penduduk kaya dengan penduduk miskin. Masalah ini salah satu yang menyebabkan ketimpangan penduduk. Bahkan kemiskinan dapat menyebabkan seseorang masuk dalam kekufuran. Menurut Manawy antara kekafiran dan kekufuran mempunyai keterkaitan yang sangat kuat, karena kekufuran merupakan satu langkah menuju kekafiran.<sup>39</sup>

Jika dilihat dari makna aslinya yang berarti ‘diam’, maka kata Miskin dapat diartikan secara istilah, yaitu orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diamnya itulah yang menyebabkan kemiskinan. Orang tersebut tidak dapat memperoleh sesuatu dikarenakan dia tidak bergerak dan tidak pula ada kemauan atau peluang untuk bergerak.<sup>40</sup> Sebagaimana yang diisyaratkan dalam QS. al-Kahfi ayat 79, sebagai berikut:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ  
وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ٧٩

Artinya: “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu,

---

<sup>38</sup> Nurul Huda, Dkk, *Ekonomi Pembanguna Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h 24

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 25

<sup>40</sup> Syaiful Ilmi, Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan EKonomi Islam IAIN Potianak, Volume 13 Nomor 1 April 2017, h.72

*karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera” (QS. al-Kahfi ayat 79)*

Ayat diatas menjelaskan bahwa dibocorkan nya perahu karena hendak menyelamatkan perahu itu dari raja zalim yang suka merampas perahu-perahu yang baik. Pada hakikatnya semua yang dilakukan itu mempunyai sebab, Allah SWT memberikan sesuatu yang pahit terlebih dahulu agar hamba nya bersabar dan berprasangka baik kepada Allah SWT, karena manusia yang tidak mampu bersabar adalah manusia yang rugi.

Kata miskin juga dapat diartikan dengan orang yang tidak memiliki sesuatu, atau memiliki sesuatu namun tidak mencukupinya, serta dapat pula diartikan dengan orang yang hina dan lemah. Selain itu, kemiskinan juga dapat diartikan dengan orang yang tidak memiliki apa-apa dan juga berpendapat bahwa miskin adalah orang tidak memiliki sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan.<sup>41</sup>

Selain pendapat diatas, kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan tidak dianjurkan dalam Islam. Islam melarang kepada umatnya untuk meninggalkan keluarganya dalam keadaan lemah dan miskin sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An Nisa’ ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

---

<sup>41</sup> M. Nur Kholis Setiawan, Pribumisasi al-Qur’an, Tafsir Berwawasan Keindonesiaan (Yogyaarta: Kaukaba, 2012), h.159

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.* (Q.S. An Nisa' ayat 9).

Ayat diatas menegaskan bahwa Islam memegang teguh prinsip keadilan, sehingga orang mukimin diingatkan untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah (miskin), agar mendapatkan kesejahteraan dengan cara bertakwa kepada Allah SWT menaati segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dan mengucapkan perkataan yang jujur.

## **B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

### **1. Definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Konsep IPM pertama kali di publikasikan UNDP melalui *Human Development Report* pada tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Dalam publikasi tersebut dijelaskan bahwa pembangunan manusia adalah sebagai *“a process of enlarging people’s choices”* atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Secara spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Mohammad Bhakti Setiawan, dkk. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*, Jurnal Ekonomika, Vol.9, Nomor 1, April 2013, hlm 18

Menurut BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan harapan hidup, waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk menghitung dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.<sup>43</sup>

Peringkat untuk indeks pembangunan manusia dari semua negara atau daerah dengan skala 0 (IPM terendah) hingga 1 (IPM tertinggi) berdasarkan tiga tujuan akhir IPM:

- a. Masa hidup yang diukur dengan usia harapan hidup
- b. Pengetahuan yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dengan rata-rata sekolah (satu pertiga)
- c. Standar kehidupan yang diukur dengan pendapatan riil per kapita, disesuaikan dengan disparitas daya beli dari mata uang setiap negara

---

<sup>43</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung 2017, (Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2017), h.29

untuk mencerminkan biaya hidup dan untuk memenuhi asumsi utilitas yang semakin menurun dari pendapatan.<sup>44</sup>

Paradigma pembangunan menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya, peningkatan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan. Rumus perhitungan Indeks Pembangunan Manusia menurut Suharto yaitu sebagai berikut:

$$\text{IPM} = 1/3 (\text{X (1)} + \text{X (2)} + \text{X (3)}) \dots\dots\dots$$

Dimana :

X (1): Indeks harapan hidup

X (2): Indeks pendidikan =  $\frac{2}{3}$  (indeks melek huruf) +  $\frac{1}{3}$  (indeks rata-rata).

X (3): Indeks standar hidup layak<sup>45</sup>

Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan perikat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 - 100,0 dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Tinggi : IPM lebih dari 80,0
- 2) Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 79,9
- 3) Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9

---

<sup>44</sup> Todaro P, *Pembangunan Ekonomi di Dunia* Edisi Ketiga...h.90

<sup>45</sup> Merang Kahang, Muhammad Saleh, Rachmad Budi Suharto, 2016, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indkes Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur”, Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Binis Universitas Mulawarman, Volume 18, (2)



4) Rendah : IPM kurang dari 50,0

## 2. Komponen-Komponen Indeks Pembangunan

### a. Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Menurut Statistik Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.<sup>46</sup> Menurut BPS, angka harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Dengan demikian, indeks harapan hidup digunakan untuk mengukur usia rata-rata hidup penduduk. Standar yang digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir.<sup>47</sup>

Program *Mortpak* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup. Ada dua jenis data yang digunakan yaitu: Anak lahir hidup (ALH) dan Anak masih hidup (AMH). Dengan memasukan angka tersebut maka diharapkan akan mencerminkan rata-rata hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup yaitu dengan

---

<sup>46</sup> Ayuk Putri Sugiantari dan I Nyoman Budiantara, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup di Jawa Timur Menggunakan Regresi Semiparametrik Spline” (Jurnal Sains Dan Seni Pomits Vol. 2, No.1, (2013), h.37

<sup>47</sup> Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, (Jakarta, Badan Pusat Statistik) 2015, h.30

cara menstandarkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.<sup>48</sup>

## **b. Tingkat Pendidikan**

Pembangunan dibidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Telah diakui bahwa pembangunan sumber daya manusia dalam suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengeksploitasi berbagai sumber daya serta menjalankan berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik yang sangat penting bagi pembangunan sosial. Dengan demikian, peningkatan pendidikan suatu negara menjadi sangat penting artinya bagi pembangunan negara tersebut.<sup>49</sup>

Penghitungan Indeks Pendidikan mencakup dua indikator yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Angka harapan sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.<sup>50</sup> Sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun

---

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> Hera Susanti, Moh.Ikhsan dan Widyawati, Indikator-indikator Makro Ekonomi, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002), h. 111

<sup>50</sup> Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru...h. 10

yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Pada proses perhitungannya masing-masing diberi bobot sepertiga.<sup>51</sup>

### c. Standar Hidup Layak

Standar hidup layak dalam arti luas menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Indeks ini menunjukkan berapa tingkat kemampuan seseorang atau suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk menjalankan kehidupan secara layak.<sup>52</sup>

Untuk mengukur standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan GNP riil yang disesuaikan. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan menggunakan data SUSENAS. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota.<sup>53</sup> Menghitung standar hidup layak dengan menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) berbasis Metode Rao. Dalam perhitungannya, digunakan batasan minimum dan maksimum.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung 2013, (Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung), h.31

<sup>52</sup> Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru...h. 10

<sup>53</sup> *Ibid*, h.5

<sup>54</sup> *Ibid*, h.7

## **C. Pendapatan PerKapita**

### **1. Definisi Pendapatan PerKapita**

Mengukur keberhasilan suatu perekonomian yang paling banyak dipakai untuk menjadi tolak ukur antara lain pendapatan nasional, produk nasional, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga, dan posisi neraca pembayaran luar negeri. Besarnya nilai output nasional dapat menunjukkan hal penting dalam sebuah perekonomian, nilai output nasional merupakan gambaran awal seberapa efisien sumber-sumber daya yang ada dalam perekonomian (tenaga kerja, barang modal, uang, dan kemampuan kewirausahaan) dan tentang produktivitas, tingkat kemakmuran suatu negara yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara, maka semakin baik efisiensi alokasi sumber daya ekonominya.<sup>55</sup>

Menurut Rakiman, Pendapatan Perkapita suatu negara merupakan tolak ukur kemajuan negara tersebut, apabila pendapatan perkapita suatu negara rendah maka mekanisme ekonomi suatu negara tersebut mengalami penurunan, begitupun sebaliknya apabila pendapatan perkapita suatu negara tinggi maka mekanisme suatu negara akan meningkat. Tetapi pendapatan tersebut bukan hanya diperoleh dari mekanisme masyarakat, banyak faktor

---

<sup>55</sup> A. Mahendra, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan PerKapita, Inflasi dan Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatera Utara, JRAK – Vol 2 No. 2, September 2016, ISSN : 2443 – 1079, h. 132

yang mempengaruhinya seperti kondisi alam yang dapat menimbulkan bencana alam.<sup>56</sup>

Pendapatan perkapita adalah besarnya semua pendapatan dan semua jumlah penduduk di suatu wilayah negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan perkapita dapat dipakai untuk melihat tingkat kesejahteraan atau standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Pendapatan perkapita memperlihatkan pula apakah kemajuan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah telah berhasil, berapa keberhasilan tersebut, dan akibat apa yang timbul oleh peningkatan tersebut.<sup>57</sup>

Suatu daerah memiliki PDRB perkapita yang tinggi umumnya memiliki *standard of living* yang juga tinggi. Perbedaan pendapatan mencerminkan kualitas hidup, negara kaya memiliki kualitas hidup yang baik dengan mencerminkan dari pendapatan perkapita yang tinggi, hal ini berbanding terbalik dengan negara miskin. Selain itu, kenaikan dalam pendapatan perkapita merupakan pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Rakiman dan Sarsiti, Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Pajak Penghasilan di Kabupaten Sukoharjo Peiode 2000-2010, h.13

<sup>57</sup> Hijri Juliansyaha, Nurbayan, Pengaruh Pendapatan Perkapita, PDRB, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2003-2016, Jurnal Ekonomika Indonesia Volume VII(2), 2018, h.14

<sup>58</sup> Junaidi E Momongan, Investasi PMA dan PMDN Pengaruhnya Terhadap Perkembangan PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Utara, Jurnal Emba. Vol. 1 No.3, h. 533



Pendapatan perkapita biasa memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan pemerintah. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah. Tingginya penerimaan daerah, diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan daerahnya dengan baik.<sup>59</sup>

## **2. Manfaat Pendapatan Perkapita**

Manfaat dari perhitungan pendapatan perkapita<sup>60</sup> adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Dengan pendapatan perkapita yang meningkat maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat.
- b. Sebagai data perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Dari pendapatan perkapita masing-masing negara dapat dilihat tingkat kesejahteraan tiap negara.
- c. Sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya. Dengan mengambil dasar pendapatan perkapita dari tahun ke tahun, dapat disimpulkan apakah pendapatan per kapita suatu negara rendah (bawah), sedang atau tinggi.

---

<sup>59</sup> Ayula Candra, Benediktus Riandoko, Dita Yuniar Saskia, Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Terhadap Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2010, Media Ekonomi dan Teknologi Informasi Vol. 20 No. 2 September 2012, h. 48

<sup>60</sup> A. Mahendra, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi..., h.134

- d. Sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Pendapatan perkapita dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah di bidang ekonomi.

## **D. Investasi**

### **1. Devinisi Investasi**

Kata investasi merupakan adopsi dari bahas Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan dalam *Kamus Lengkap Ekonomi*, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.<sup>61</sup>

Menurut Sukirno, investasi didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa depan.<sup>62</sup> Sedangkan pendapat lainnya investasi diartikan sebagai komitmen atas

---

<sup>61</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasai Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), h.7

<sup>62</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h.69

sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa depan.<sup>63</sup>

Menurut Kamaruddin Ahmad bahwa yang dimaksud dengan investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Dalam definisi ini, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana dengan tujuan untuk meperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan.<sup>64</sup>

Dalam ranah ekonomi makro investasi merupakan bagian komponen yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian, istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa yang akan datang.<sup>65</sup>

## **2. Jenis Investasi**

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Investasi Pemerintah adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya, investasi yang dilakukan pemeritah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

---

<sup>63</sup> Eduardus Tandelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, (Yogyakarta: BPFE, 2001), h.12

<sup>64</sup> Abdul Manan, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.94

<sup>65</sup> Basuki Pujoalwanto, Perekonomian Indonesia, Tinjauan Historis, Teoritis, Empiris, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.164

- b. Investasi Swasta adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA).

Dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang menyebutkan bahwa penanaman modal dibagi menjadi dua yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pihak yang dapat menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri adalah orang perorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia dan badan hukum Indonesia.<sup>66</sup>

Sedangkan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>67</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk membangun ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Ada dua macam PMA yaitu sebagai berikut:

- a. Investasi portofolio (*portfolio investment*), yakni investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham yang dinilai dalam mata uang nasional. Kegiatan-kegiatan investasi ini biasanya berlangsung pada lembaga-lembaga keuangan.
- b. Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*), yakni investasi yang meliputi aset-aset secara nyata, berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi dan sebagainya. Di negara berkembang seperti Indonesia, modal asing sangat diperlukan terutama sebagai akibat dari modal dalam negeri yang tidak mencukupi. Untuk itu berbagai kebijakan di bidang penanaman modal perlu diciptakan dalam upaya menarik pihak luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia.<sup>68</sup>

### 3. Tujuan dan Manfaat Investasi

Tujuan Investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan.

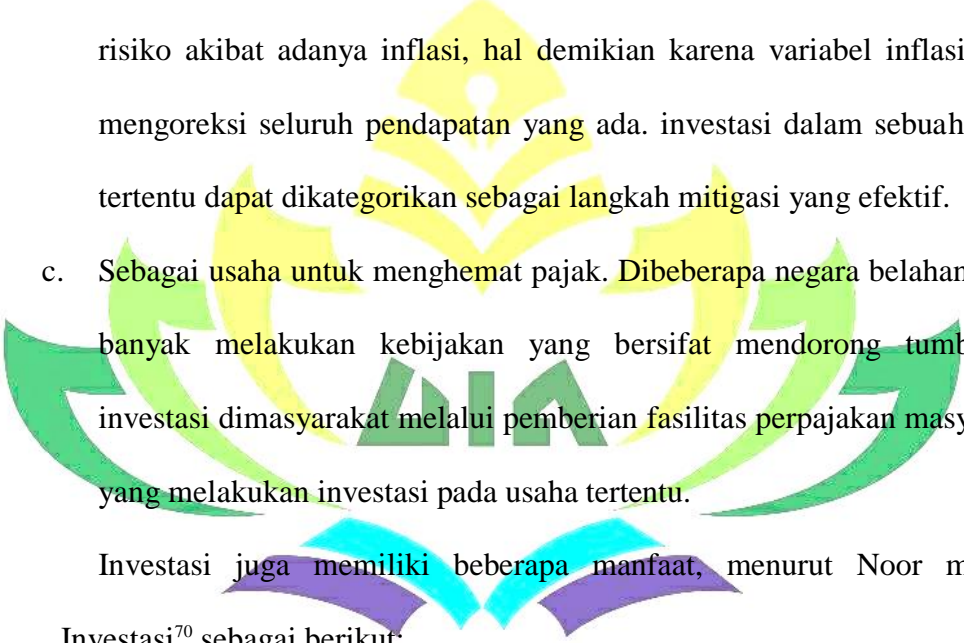
Dalam konteks perekonomian, ada beberapa motif seseorang melakukan investasi<sup>69</sup>, antara lain:

---

<sup>68</sup> Abdul Latif Hamzah, Anifatul Hanim, Herman Cahyo, "Pengaruh Investasi dan Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Jember Tahun 2000-2015", e-Journal Ekonomi dan Akuntansi, 2019, Volume VI (1), h.82

<sup>69</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*...h. 8



- 
- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut di masa depan selalu akan dilakukan.
  - b. Mengurangi tekanan inflasi. Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan risiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif.
  - c. Sebagai usaha untuk menghemat pajak. Dibeberapa negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi dimasyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.

Investasi juga memiliki beberapa manfaat, menurut Noor manfaat Investasi<sup>70</sup> sebagai berikut:

- a. Investasi yang bermafaat untuk umum (publik). Hampir semua bentuk investasi bermanfaat bagi kepentingan umum, karena investasi menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat. Contoh investasi nya adalah investasi pendidikan dan sumber daya manusia,

---

<sup>70</sup> H.F Noor, Ekonomi Publik: Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat, (Jakarta: PT. Indeks, 2015), h.47

investasi dibidang infrastruktur (jalan, jembatan, pasar, pelabuhan dan lain-lain), investasi dibidang kesehatan.

- b. Investasi yang bermanfaat untuk kelompok pribadi atau rumah tangga. Investasi yang bermanfaat untuk kelompok adalah investasi dibidang olahraga, sedangkan investasi yang bermanfaat untuk rumah tangga seperti investasi untuk usaha atau mendapatkan penghasilan, investasi untuk perumahan.
- c. Investasi memiliki manfaat bagi kepentingan umum maupun kelompok pribadi. Investasi bermanfaat bagi kepentingan umum yaitu dalam bidang infrastuktur dengan membangun jalan, jembatan dan pasar. Sedangkan manfaat investasi bagi pribadi yaitu untuk kepentingan pribadi dengan investasi di bidang property, membangun perumahan, pusat perbelanjaan dll.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian terkait pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan telah dilakukan oleh banyak peneliti. Penelitian-penelitian sejenis yang menjadi referensi dan inspirasi dalam penelitian ini secara ringkas sebagai berikut:

A. Mahendra pada tahun 2016, dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan PerKapita, Inflasi dan Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatera Utara”. Variabel yang digunakan meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan PerKapita, Inflasi dan

Pengangguran. Metode yang digunakan adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS), yang menggunakan beberapa metode regresi linear untuk mengelola data menggunakan SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien determinasi ( $R^2$ ) dari 0,698, yang berarti bahwa variabel independen, yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, inflasi, dan pengangguran mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.<sup>71</sup>

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran, sedangkan pada penulis hanya membahas pada pendapatan perkapita, ipm dan investasi. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) sedangkan penulis menggunakan teknik analisis data *Time Series* dengan regresi linier berganda.

Ahmad Syaifullah, Nazaruddin Malik, dengan judul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap Tingkat Kemiskinan di ASEAN-4 (Studi pada 4 Negara ASEAN)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap tingkat kemiskinan di ASEAN- 4. Metode alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di ASEAN-4 dengan nilai probabilitas sebesar 0,1149. Kemudian,

---

<sup>71</sup> A. Mahendra, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, ....h.123

Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di ASEAN-4 dengan nilai probabilitas 0,0000.<sup>72</sup>

Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independen yang hanya membahas IPM dan PDB, sedangkan penulis ingin membahas IPM, Pendapatan PerKapita dan Investasi.

Anak Agung Istri Diah Paramita, Ida Bagus Putu Purbadharmaja, dengan judul “Pengaruh Investasi dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kemiskinan di Provinsi Bali”. Penelitian ini menggunakan periode tahun dari tahun 1993-2013 dan menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh diuji dengan teknik analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian menyatakan, secara langsung variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan secara langsung variabel investasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Selanjutnya untuk pengaruh investasi terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Ahmad Syaifullah, Nazaruddin Malik, Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap Tingkat Kemiskinan di ASEAN-4 (Studi pada 4 Negara ASEAN), Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1 Jilid 1/2017 Hal. 107

<sup>73</sup> Anak Agung Istri Diah Paramita, Ida Bagus Putu Purbadharmaja, Pengaruh Investasi dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kemiskinan di Provinsi Bali, E-Jurnal Ekonomi pembangunan Universitas Udayana, Vol.4, No.10 Oktober 2015, h.1194

Perbedaan lain pada penelitian terletak pada variabel dependen dimana pada penelitian ini membahas dua variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi dan IPM.

Elda Wahyu Azizah, Sudarti, Hendra Kusuma, dengan judul “Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur”. Metode alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Dengan probabilitasnya  $0.0000 < \alpha = 0.10$  dan  $t$  hitung  $-15.35144 < t$  tabel  $2.02439$ . Pendapatan perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Dengan nilai probabilitasnya  $0.0903 < \alpha = 0.10$  dan  $t$  hitung  $-1.702527 < t$  tabel  $1.28612$ . Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Dengan nilai probabilitasnya  $0.000 < \alpha = 0.10$  dan  $t$  hitung  $47.34174 > t$  tabel  $1.28612$ .<sup>74</sup>

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yang membahas pendidikan pendapatan perkapita dan jumlah penduduk, sedangkan pada penulis menggunakan variabel IPM, pendapatan perkapita dan investasi.

---

<sup>74</sup> Elda Wahyu Azizah, Sudarti, Hendra Kusuma, Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 2 Jilid 1/Tahun 2018, h.167

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi data panel sedangkan pada penulis menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hastina Febriaty, Nurwani, dengan judul “Pengaruh Pendapatan Perkapita, Investasi dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara”. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia dari tahun 2001-2015. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program e-views 8.1 dan melakukan pengujian asumsi klasik serta menggunakan pengujian hipotesis secara simultan (F) dan parsial (t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, Investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sedangkan, Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Secara simultan pendapatan perkapita, investasi dan inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.<sup>75</sup>

Perbedaan pada penelitian ini menggunakan variabel inflasi sedangkan pada penulis menggunakan variabel IPM. Dan pada penelitian ini menggunakan program E-Views 8.1.

---

<sup>75</sup> Hastina Febriaty, Nurwani, Pengaruh Pendapatan Perkapita, Investasi dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol 3 No. 2 2017, h.156

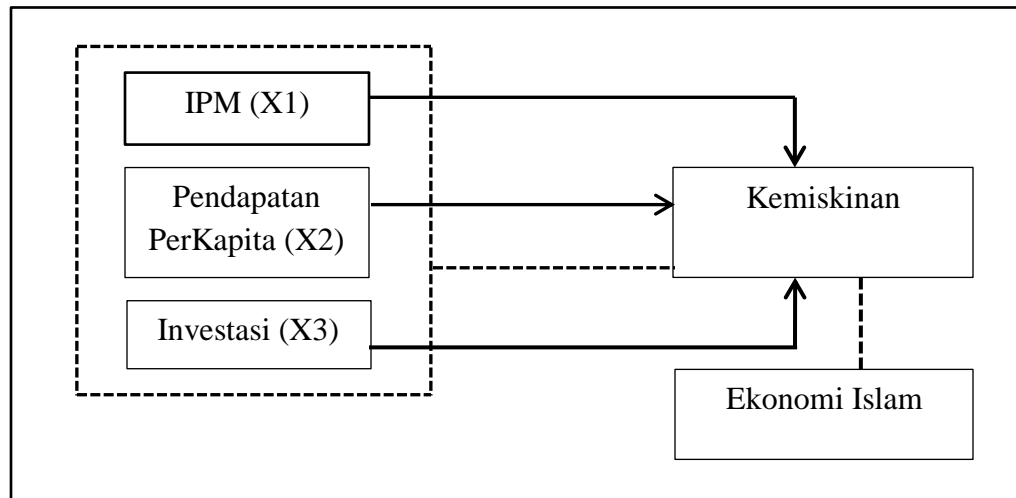


## **F. Kerangka Berpikir**

Berdasarkan landasan teori dan penelitian yang dilakukan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang sedang dihadapi pemerintahan Provinsi Lampung adalah terkait dengan masalah tingginya tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan Provinsi Lampung menempati urutan ke tiga tertinggi di Pulau Sumatera. Hal ini menjadi masalah serius yang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan. Berdasarkan teori lingkaran kemiskinan oleh Nukse menerangkan bahwa kemiskinan di pengaruhi oleh tiga indikator yang kemudian dijadikan variabel independen pada penelitian ini, yaitu IPM, Pendapatan Perkapita dan Investasi.

Untuk memudahkan peneliti yang dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, bahwa penjelasan mengenai hubungan variabel diatas, maka ditetapkan bahwa Kemiskinan (Y), IPM (X1), Pendapatan PerKapita (X2), Investasi (X3). Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh pada variabel IPM, Pendapatan PerKapita, Investasi, terhadap Kemiskinan. Maka disusun untuk kerangka pemikiran mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.2.

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**



Keterangan:

1. — = Secara Parsial
2. - - - = Secara Simultan

### G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.<sup>76</sup>

Maka hipotesis dalam penelitian ini dapat diajukan sebagai berikut:

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu: Indeks

<sup>76</sup> Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan Kombinasi (Bandung : Alfabeta, 2014), h.99

Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Indeks Standar, Hidup Layak.<sup>77</sup>

Dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi maka akan meningkatkan keterampilan, penguasaan teknologi dan produktivitas penduduk, dengan meningkatnya hal tersebut akan meningkatkan nilai jual dan kemampuan penduduk untuk memperoleh pekerjaan, sehingga pengangguran akan berkurang dan tingkat pendapatan akan bertambah. Sehingga hal tersebut akan menurunkan tingkat kemiskinan.<sup>78</sup>

Hasil ini sesuai dengan teori pertumbuhan baru dimana didalam teori pertumbuhan baru, ditekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia, karena rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan sebagainya.<sup>79</sup>

Sehingga dari penjelasan teori dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setyo Novianto, maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ha: Pada IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan

Ho: Pada IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan

## 2. Pengaruh Pendapatan PerKapita terhadap Kemiskinan

---

<sup>77</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2015), h.307

<sup>78</sup> Sylvia Yasmin Supraba, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2015*, h. 21

<sup>79</sup> Setyo Novianto, *judul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Inflasi, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*, h.76

Pendapatan regional per kapita atau PDRB per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. PDRB perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut.<sup>80</sup> Jika masyarakat memiliki penghasilan atau gaji tinggi maka masyarakat bisa menghidupi kehidupannya dan menabung untuk biayanya di masa depan. Jika pendapatan masyarakat menurun maka sulit bagi masyarakat itu mencukupi kebutuhan hidupnya.<sup>81</sup>

Berbagai penelitian empiris telah dilakukan diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh, Hastina Febriaty, Nurwani, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif antara pendapatan perkapita dengan kemiskinan, sehingga semakin tinggi pendapatan tersebut maka semakin tinggi daya beli penduduk, dan daya beli yang bertambah ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>82</sup> Jadi dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ha: Pada Pendapatan Perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan.

---

<sup>80</sup> A. Mahendra, h.134

<sup>81</sup> Elda Wahyu Azizah, Sudarti, Hendra Kusuma, h.169

<sup>82</sup> Hastina Febriaty, Nurwani, 164

Ho: Pada Pendapatan Perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.

### 3. Pengaruh Investasi terhadap Kemiskinan

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.<sup>83</sup> Menurut Noor, pada dasarnya hampir semua bentuk investasi bermanfaat bagi kepentingan publik atau umum karena investasi menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Investasi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Berbagai penelitian empiris telah dilakukan diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh, Yolanda Pateda Vecky dan Tri Oldy Rotinsuli pada provinsi Gorontalo menyatakan bahwa investasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.<sup>84</sup> Dengan demikian, investasi diperlukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat berupa sumber nafkah atau pendapatan yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa. Jadi dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ha: Pada Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan.

---

<sup>83</sup> *Ibid*, h.159

<sup>84</sup> Yolana Pateda dkk, "Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Gorontalo", Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol 19 No.3, 2017

Ho: Pada Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.

4. Pengaruh IPM, Pendapatan Perkapita dan Investasi terhadap Kemiskinan secara Simultan atau bersama-sama.

Kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak lama. Kemiskinan timbul akibat perbedaan kemampuan, perbedaan kesempatan, dan perbedaan sumberdaya. Hal ini kemiskinan dapat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu IPM, pendapatan perkapita dan investasi. Dengan tingginya angka IPM akan meningkatkan produktivitas kerja sehingga mereka mampu mendapatkan kerja, dan dapat pula meningkatkan pendapatan, dengan meningkatnya pendapatan maka masyarakat akan mampu berinvestasi.

IPM, pendapatan perkapita, dan investasi menurut fungsi ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Hastina Febriaty, Nurwani dan Yunie Rahayu, hasil penelitian tersebut adalah indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sehingga dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ha: IPM, Pendapatan Perkapita dan Investasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kemiskinan

Ho: IPM, Pendapatan Perkapita dan Investasi tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kemiskinan



## DAFTAR PUSTAKA

- A Mahendra, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan PerKapita, Inflasi dan Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatera Utara", JRAK – Vol 2 No. 2, ISSN: 2443 – 1079, 2016.
- Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.
- Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Makro Islami*, Edisi Ketiga, Jakarta, 2015.
- Adnan, P. Eko Prasetyo, "Investment On The Community Income And The Economic Growth In Central Java", Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura Volume 13. Universitas Negeri Malang, 2010.
- Ahmad Syaifullah, Nazaruddin Malik, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap Tingkat Kemiskinan di ASEAN-4 (Studi pada 4 Negara ASEAN)", Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1 Jilid 1, 2017.
- Anak Agung Istri Diah Paramita, Ida Bagus Putu Purbadharmaja, "Pengaruh Investasi dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kemiskinan di Provinsi Bali", E-Jurnal Ekonomi pembangunan Universitas Udayana, Vol.4, No.10, 2015.
- Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta Universitas Gajah Mada, 2015.
- Ayula Candra, Benediktus Riandoko, Dita Yuniar Saskia, "Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Terhadap Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2010", Media Ekonomi dan Teknologi Informasi Vol. 20 No. 2, 2012.
- Azizah, Elda Wahyu, Sudarti dan Hendra Kusuma, "Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur", Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 2 Jilid 1, 2018.

Bhinadi, Ardito, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta Deepublish, 2017.

BPS Provinsi Lampung, Laporan Perekonomian Provinsi Lampung

BPS, Provinsi Lampung Dalam Angka 2017". Desember 2018

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2012.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2011.

Desmawan, Deris, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung", Tesis, Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Lampung, 2016.

Febriaty, Hastina dan Nurwani, "Pengaruh Pendapatan Perkapita, Investasi dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara", Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol 3 No. 2, 2017.

H.F Noor, *Ekonomi Publik: Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta, PT.Indeks, 2015.

Harlik, Amri Amir, dan Hardiani, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi", Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 1 No. 2, 2013.

Hasan, Iqbal, *Metodelogi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.

Hera Susanti, Moh.Ikhsan dan Widyawati, *Indikator-indikator Makro Ekonomi*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002.

- Hijri Juliansyah, Nurbayan, 2018, “Pengaruh Pendapatan Perkapita, PDRB, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2003-2016”, *Jurnal Ekonomika Indonesia* Volume VII (2)
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasai Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2007.
- Ilmi, Syaiful, “Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Potianak”, Volume 13 Nomor 1, 2017.
- Kadir, *Statistika Terapan Konsep, Contoh, dan Analisa Data dengan Program SPSS/Lisrel dalam Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Pustaka, 2010.
- Momongan, Junaidi, “Investasi PMA dan PMDN Pengaruhnya Terhadap Perkembangan PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Utara”, *Jurnal Emba*. Vol. 1 No.3, 2015.
- Mubyanto, “Kemiskinan, Pengangguran, dan Ekonom”, Vol. III, No 2: *Jurnal Dinamika Masyarakat*, 2004.
- , *Mudah Memahami dan Menganalisi Indikator Ekonomi*, Cetakan kedua, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2015.
- Mudrajat, Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan Edisi Keempat*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2016.
- Pateda, Yolana, “Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Gorontalo”, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol 19 No.3, 2017.
- Pujoalwanto, Basuki, *Perekonomian Indonesia, Tinjauan Historis, Teoritis, Empiris*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014.
- Rangkuti, Freddy, *Riset Pemasaran*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.

- Setiawan, M. Nur Kholis, *Pribumisasi al-Qur'an, Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* Yogyaarta, Kaukaba, 2012.
- Sugiantari, Ayuk Putri dan I Nyoman Budiantara, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup di Jawa Timur Menggunakan Regresi Semiparametrik Spline”, *Jurnal Sains Dan Seni Pomits* Vol. 2, No.1, 2013.
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan Kombinasi*, Bandung, Alfabeta, 2014.
- Suharto, Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universitas Bidang Kesehatan*. Bandung, CV Alfabeta Eduardus Tandelilin, 2009
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi, Cetakan Prtama*, Yogyakarta, Pustaka Baru Perss, 2015.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tambunan, Tulus T.H., *Perekonomia Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003.
- Tandelilin, Erduardus, *Portofolio dan Investasi*, Yogyakarta, Kanisius, 2010.
- Widyatmanti, Wirastuti dan Dini Natalia, *Geografi*, Jakarta, PT.Grasindo, 2008.
- Wiguna, Van Indra, “Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010”, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2013.
- Yunus, Rabania dan Mansyur Radjab, Analisis Pengentasan Kemiskinan, *Studi Kasus pada Program Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*, Makasar, CV. Social Politic Genius (SIGn), Rajawali Pers, 2018.